

KantorupbutumbangsambaKantorupb
utumbangsambaKantorupbutumbang
sambaKantorupbutumbangsambaKan
torupbutumbangsambaKantorupbutu
mbangsambaKantorupbutumbangsamb
mbaKantorupbutumbangsambaKanto
rupb
bangs
aKan
butu
gsam
ntoru
umbangsambakantorupbutumbangsamb
mbaKantorupbutumbangsambaKanto
rupbutumbangsambaKantorupbutum
bangsambaKantorupbutumbangsamb
aKantorupbutumbangsambaKantorup
butumbangsambaKantorupbutumban
gsambaKantorupbutumbangsambaKa
ntorupbutumbangsambaKantorupbut
umbangsambaKantorupbutumbangsamb
mbaKantorupbutumbangsambaKanto
rupbutumbangsambaKantorupbutum
bangsambaKantorupbutumbangsamb
aKantorupbutumbangsambaKantorup
butumbangsambaKantorupbutumban
gsambaKantorupbutumbangsambaKa
ntorupbutumbangsambaKantorupbu

**KANTOR UPBU KELAS III
TUMBANG SAMBA**

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal
31 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor UPBU Tumbang Samba adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor UPBU Tumbang Samba. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tumbang Samba, 27 Februari 2025
Kepala Kantor UPBU Tumbang Samba



DWI MULIA RAHARJO, S.Si.T., M.T.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

KANTOR UPBU TUMBANG SAMBA
JL. Minun Dehen Tumbang Samba Katingan/Kasongan
TELEPON 0811-5203-031, FAXIMILE bdr_tsb@yahoo.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor UPBU Tumbang Samba yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Tumbang Samba, 27 Februari 2025
Kepala Kantor UPBU Tumbang Samba

Dwi Muji Raharjo, S.Si.T., M.T.
NIP. 19800122 200604 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor UPBU Tumbang Samba Semester II Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp18.064.766. atau mencapai 77 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp23.336.000,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2024 adalah sebesar Rp9.995.747.520 atau mencapai 95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp10.512.056.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.691.650.010 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.691.650.010; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp14.691.650.010.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.064.766 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp19.078.126.467 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(19.060.061.701). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp(19.060.061.701) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(19.060.061.701)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Juli 2024 adalah sebesar Rp22.952.728.957 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(19.060.061.701) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.798.982.754 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp14.691.650.010.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan

Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR UPBU TUMBANG SAMBA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th 2024				Th 2023
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara Dan Hibah	B.1					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	23.336.000,	18.064.766,	(5.271.234,)	77	10.320.856,
Jumlah Pendapatan dan Hibah		23.336.000,	18.064.766,	(5.271.234,)	77	10.320.856,
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	2.986.004.000,	2.944.589.094,	(41.414.906,)	99	2.648.834.075,
Belanja Barang	B.4	7.526.052.000,	7.051.158.426,	(474.893.574,)	94	4.866.359.927,
Belanja Modal	B.5	0	0	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	B.6	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja		10.512.056.000,	9.995.747.520,	(516.308.480,)	95,	7.515.194.002,

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR UPBU TUMBANG SAMBA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	0	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan		0	0
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	0	0
Penysihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.1.7	0	0
Beban Dibayar di Muka	C.1.8	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.9	0	0
Persediaan	C.1.10	0	0
JUMLAH ASET LANCAR		0	0
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2.2	12.370.363.288,	12.370.363.288
Gedung dan Bangunan	C.2.3	12.577.464.850,	11.756.164.850
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	56.678.882.310,	56.678.882.310
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(66.935.060.438,)	(57.852.681.491)
JUMLAH ASET TETAP		14.691.650.010,	22.952.728.957
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan		0	0
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	0	0
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	0	0
Penysihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	0	0
Aset Lain lain	C.4.2	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
JUMLAH ASET		0	0
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	0	0
Utang yang Belum Ditagihkan	C.5.2	0	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.3	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.4	0	0
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.5	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	14.691.650.010,	22.952.728.957
JUMLAH EKUITAS		14.691.650.010,	22.952.728.957
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.691.650.010	22.952.728.957

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR UPBU TUMBANG SAMBA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	18.064.766,	7.800.856,
JUMLAH PENDAPATAN		18.064.766,	7.800.856,
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.944.589.094,	2.648.834.075,
Beban Persediaan	D.3	314.134.800,	334.625.200,
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.269.098.787,	1.612.815.300,
Beban Pemeliharaan	D.5	5.209.871.100,	2.760.427.900,
Beban Perjalanan Dinas	D.6	258.053.739,	158.491.527,
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0,	0,
Beban Bantuan Sosial	D.8	0,	0,
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	9.082.378.947,	9.331.563.018,
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0,	0,
JUMLAH BEBAN		19.078.126.467,	16.846.757.020,
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(19.060.061.701,)	(16.838.956.164,)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0,	0,
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		0,	0,
Beban Penjualan Aset Non Lancar		0,	0,
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,	2.520.000,
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,	2.520.000,
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,	0,
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	0,	2.520.000,
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(19.060.061.701,)	(16.836.436.164,)
POS LUAR BIASA	D.12	0,	0,
Pendapatan Luar Biasa		0,	0,
Beban Luar Biasa		0,	0,
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,	0,
SURPLUS (DEFISIT) LO		(19.060.061.701,)	(16.836.436.164,)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR UPBU TUMBANG SAMBA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	22.952.728.957,	32.284.291.975,
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(19.060.061.701,)	(16.836.436.164,)
DAMPAK AKUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.2	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	0	0
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	10.798.982.754,	7.504.873.146,
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(8.261.078.947,)	(9.331.563.018,)
EKUITAS AKHIR	E.6	14.691.650.010,	22.952.728.957,

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor UPBU Tumbang Samba

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

Kantor UPBU Tumbang Samba didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan di Jalan Minun Dehen Tumbang Samba.

Kantor UPBU Tumbang Samba mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor UPBU Tumbang Samba berkomitmen dengan misi **"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas."** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan,
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya,
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor UPBU Tumbang Samba. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor UPBU Tumbang Samba menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor UPBU Tumbang Samba dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor UPBU Tumbang Samba. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor UPBU Tumbang Samba adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan

- hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak

berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2023 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajibanban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.512.056.000. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	23.336.000	23.336.000
Jumlah Pendapatan	23.336.000	23.336.000
Belanja		
Belanja Pegawai	2.986.004.000	2.986.004.000
Belanja Barang	7.526.052.000	7.526.052.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	10.512.056.000	10.512.056.000

Realisasi
Pendapatan
Rp18.064.766

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.064.766 atau mencapai 29,18 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp23.336.000. Pendapatan Satuan Kerja Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan jasa	23.336.000	18.064.766	29,18
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	23.336.000	18.064.766	29,18

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2024 mengalami kenaikan 75% persen dibandingkan TA 2023. Hal tersebut terjadi karena kegiatan penerbangan di TA 2024 mulai aktif pada

Bulan April, sedangkan di TA 2023 kegiatan operasional penerbangan sudah dimulai sejak Bulan Januari.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan Jasa	18.064.766	10.320.856	75%
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	18.064.766	10.320.856	75%

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba pada TA 2024 adalah sebesar Rp9.995.747.520 atau 95% dari anggaran belanja sebesar Rp10.512.056.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.986.004.000	2.944.589.094	99
Belanja Barang	7.526.052.000	7.051.158.426	94
Belanja Modal	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	10.512.056.000	9.995.747.520	95
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah	10.512.056.000	9.995.747.520	95

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 33,01% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1. Terdapat pengurangan jumlah pegawai dan mutasi pegawai sehingga mempengaruhi belanja pegawai
- 2. Terdapat penambahan jumlah pegawai baik dari program mutasi ataupun polbit
- 3. Terdapat penambahan biaya pemeliharaan aset seperti gedung dan bangunan, dll.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Belanja Pegawai	2.944.589.094	2.648.834.075
Belanja Barang	7.051.158.426	4.866.359.927
Belanja Modal	0	0

Belanja Bantuan Sosial	0	0	42,86
Jumlah	9.995.747.520	7.515.194.002	40,25

Belanja Pegawai
Rp2.944.589.094

B.3 Belanja Pegawai
 Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.944.589.094 dan Rp2.648.834.075. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,18 persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai dan perekrutan CPNS baru Polbit tahun 2024

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
 TA 2024 dan 2023
 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.745.492.898	2.526.249.075	8,68
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	0
Belanja Honorarium	0	0	0
Belanja Lembur	199.457.000	122.585.000	62,71
Jumlah Belanja Kotor	2.944.949.898	2.648.834.075	11,18
Pengembalian Belanja Pegawai	(360.804)	0	0
Jumlah Belanja	2.944.589.094	2.648.834.075	11,18

Belanja Barang
Rp7.051.158.426

B.4 Belanja Barang
 Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.051.158.426 dan Rp4.866.359.927. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan 44,90% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan oleh penambahan biaya untuk pemeliharaan aset seperti gedung dan bangunan, dll.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
 TA 2024 dan 2023
 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Barang Operasional	86.110.000	84.362.000	2,07

Belanja Barang Non Operasional	33.300.000	2.520.000	1221
Belanja Honor	79.560.000	148.996.000	(46,60)
Belanja Jasa	47.223.257	93.686.000	(49,59)
Belanja Pemeliharaan	5.209.871.100	2.760.427.900	88,73
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	258.053.739	158.491.527	62,82
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.000.000	10.250.000	36,59
Belanja Bahan	232.936.400	29.880.300	679
Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi	0	20.000.000	(100)
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	51.656.800	32.836.300	57,32
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	314.134.800	334.625.200	(6,12)
Belanja Keperluan Perkantoran	724.312.330	1.190.284.700	(39,15)
Jumlah Belanja Kotor	7.051.158.426	4.866.359.927	44,90
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah Belanja	7.051.158.426	4.866.359.927	44,90

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp0

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal
Tanah Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
--------	----------------	----------------	---

-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-

Belanja Bantuan Sosial Rp0

Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

Aset Lancar Rp0

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Bank BERSAMA No.acc 651314996411000	0	0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara Penerimaan

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang

Rp0

meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel xx
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Bank BERSAMA No.acc -	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31

Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	-	-	-
	Jumlah	-	-

Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.
Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	-	-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek
Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			

Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-		-

Beban Dibayar di Muka
Rp0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp314.134.800

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp314.134.800 dan Rp334.625.200 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	314.134.800	334.625.200
Barang untuk Pemerliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	314.134.800	334.625.200

Aset Tetap
Rp14.691.650.010

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.691.650.010 dan Rp22.952.728.957.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan opreasional entitas. Aset Tetap pada Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp0

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Dikarenakan Kantor UPBU Tumbang Samba masih belum memiliki tanah.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Tanah
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	0
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	0

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Tanah TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			-

Peralatan dan Mesin
Rp12.370.363.288

C.2.2. Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp12.370.363.288 dan Rp12.370.363.288. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	12.370.363.288
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo Per 31 Desember 2024	12.370.363.288
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	12.370.363.288

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin tidak ada.
Mutasi kurang tidak ada. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada lampiran laporan keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp12.577.464.850

C.2.3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp12.577.464.850 dan Rp11.756.164.850. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	11.756.164.850
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	821.300.000
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 31 Desember 2024	12.577.464.850
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	12.577.464.850

Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp56.678.882.310

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp56.678.882.310 Rp56.678.882.310 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	56.678.882.310
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2024	56.678.882.310
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	56.678.882.310

Mutasi tambah: Tidak ada
Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	0

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap
Rp(66.935.060.436)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(66.935.060.436) dan Rp(57.852.681.491). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian

atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

Tabel xx
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	12.370.363.288	(11.676.339.426)	24.046.702.714
2.	Gedung dan Bangunan	12.577.464.850	(1.493.859.861)	14.071.324.711
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.678.882.310	(53.764.861.149)	110.443.743.459
4.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	81.626.710.448	(66.935.060.436)	148.561.770.884

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang
Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.
Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	-	-	-
6.	-	-	-
	Jumlah	-	-

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Bagian lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel xx
Rincian Piutang TPA TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	-	-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel xx
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang
TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Tagihan TPA			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0	0

Aset Lainnya
Rp0

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya umumnya terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Saldo Per 31 Desember 2024	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	-

Mutasi tambah:
Tidak ada.
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	-	0
2.	-	0
	Jumlah	0

Aset Lain-Lain
Rp0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba .

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Lain-lain
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	

Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo Per 31 Desember 2024	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	-	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
B.	Aset Lain-lain	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Total	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka
Pendek Rp0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
Kewajiban Jangka Pendek Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN
Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga
Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan

merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).
Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	0
2.	Potongan Pajak yang belum disetor	0
3.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
Total		0

Pendapatan Diterima
di Muka Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Jumlah	-

Beban yang Masih
Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	0	0

Ekuitas
Rp14.691.650.010

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.691.650.010 dan Rp22.952.728.957.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan
PNBP
Rp18.064.766

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp18.064.766 dan Rp10.320.856. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan PNBPN Lainnya	18.064.766	10.320.856	75,03
Jumlah	18.064.766	10.320.856	75,03

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan PNBPN lainnya yang merupakan pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp2.944.589.094

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.944.589.094 dan Rp2.648.834.075. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Gaji	970.005.897	913.498.179	6,19
Beban Tunjangan-tunjangan	1.775.126.197	1.612.750.896	10,07
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0
Beban Lembur	199.457.000	122.585.000	62,71
Jumlah Beban	2.944.589.094	2.648.834.075	11,17

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp314.134.800

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp314.134.800 dan Rp334.625.200. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	314.134.800	334.625.200	(6,12)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban	314.134.800	334.625.200	(6,12)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp1.269.098.787

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.269.098.787 dan Rp1.612.815.300. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Barang Operasional	1.269.098.787	1.612.815.300	(21,31)
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah Beban	1.269.098.787	1.612.815.300	(21,31)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp5.209.871.100

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.209.871.100 dan Rp2.760.427.900. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena

adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.661.865.000	347.600.000	378
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.564.360.100	1.264.187.900	23,74
Beban Pemeliharaan lainnya	1.983.646.000	1.148.640.000	0
Jumlah Beban	5.209.871.100	2.760.427.900	88,73

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan Dinas
Rp258.053.739

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp258.053.739 dan Rp158.491.527. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	215.483.768	112.828.223	90,98
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.569.971	45.663.304	(6,77)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Jumlah Beban	258.053.739	158.491.527	62,82

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor UPBU Tumbang Samba untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan	0	0	0

kepada Masyarakat/Pemda			
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp9.082.378.947

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.082.378.947 dan Rp9.331.563.018. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	942.799.021	942.799.021	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.494.755.459	7.743.939.530	(3,22)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	644.824.467	644.824.467	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	9.082.378.947	9.331.563.018	(2,67)

Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban	9.082.378.947	9.331.563.018	(2,67)

Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.11 Kegiatan Non Operasional
Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	2.520.000	(100.00)
-	0	0	0
-	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	(100.00)

Pos Luar Biasa
Rp0

D.12 Pos Luar Biasa
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1. Ekuitas Awal

Rp22.952.728.957 Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp22.952.728.957 dan Rp32.284.291.975.

Defisit LO
Rp(19.060.061.701) **E.2. Surplus/Defisit-LO**
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp19.060.061.701 dan Rp(16.836.436.164). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0 **E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi**
Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0 **E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset**
Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0 **E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan**
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0
Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2024

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	-
2.	Suku Cadang	-
Jumlah		-

Selisih Revaluasi Aset Rp0 **E.4.3. Selisih Revaluasi Aset**
Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0 **E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-

Koreksi Lain-lain Rp0

Jumlah	-
--------	---

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Koreksi Lain-lain TA 2024

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp9.977.682.754

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 9.977.682.754 dan Rp7.504.873.146 Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel xx
Transaksi Antar Entitas TA 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(18.064.766)
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.995.747.520
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	9.977.682.754

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 terdiri dari:

Tabel xx

Transfer Masuk TA 2024			
No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	-	-
2.	Persediaan	-	-
Jumlah			-

Sama halnya dengan besarnya Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp0.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel xx Pengesahan Hibah Langsung TA 2024			
No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	-	-	-
2.	-	-	-
Total Pengesahan			-
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2024 disajikan pada Lampiran.

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.691.650.010 dan Rp22.952.728.957.

Ekuitas Akhir
Rp14.691.650.
010

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pada tanggal 31 Desember 2024 tidak ada terjadi kejadian yang mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada stakeholder.

F.1 Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Menteri Akuntansi Nomor: 009/BALAP.5/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 018/BALAP.5/2026 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Akuntansi pada tanggal 30 September 2024 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan, Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Dwi Muji Raharjo
Pejabat Pembuat Komitmen	: Supriadi Bastanta Bangun
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Jainal
Bendahara	: Efi Sutanti
Menjadi:	
Kuasa Pengguna Anggaran	: Dwi Muji Raharjo
Pejabat Pembuat Komitmen	: Supriadi Bastanta Bangun
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Hareis Yando
Bendahara	: Jainal